

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan mencantumkan landasan teori dan studi empiris yang digunakan penulis sebagai acuan pada penelitian ini.

2.1. Ketenagakerjaan

Pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja, baik itu di perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintahan. Menurut Sukirno (2004) angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah pekerja atau tenaga kerja yang ada dalam ruang lingkup perekonomian dalam kurun waktu tertentu yang digolongkan menjadi kelompok yang sedang bekerja dan kelompok yang sedang menganggur namun sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja biasanya dapat dijelaskan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK sendiri membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yaitu 15-64 tahun yang dianggap mampu menghasilkan barang dan jasa.

Menurut UU No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat, yang mana nantinya menjadi modal bagi bergeraknya roda perekonomian negara.

2.1.1. Jenis-jenis ketenagakerjaan

Tenaga kerja dapat dikelompokkan menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan. Namun jika dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan yaitu tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil dan tenaga kerja terdidik. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang pekerjaan.
- b) Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja tertentu.
- c) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan ahli dalam suatu bidang tertentu.

2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

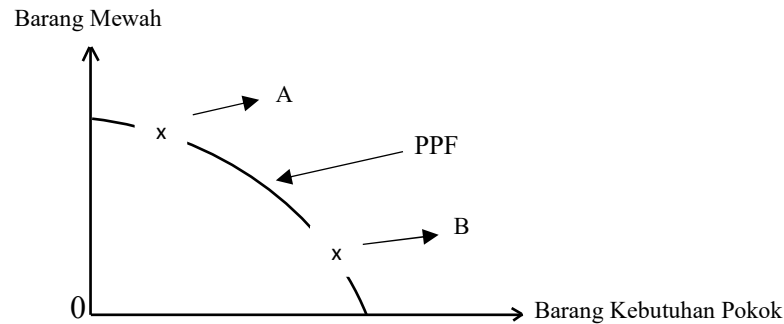
Menurut Bappeda DIY (2020) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja (dalam hal ini usia 15-64 tahun) yang berpotensi untuk aktif menjadi tenaga kerja di suatu negara. Nilai TPAK yang tinggi menggambarkan tingginya kontribusi penduduk usia kerja yang bekerja atau tidak

mengganggu. Saat nilai TPAK turun, hal tersebut menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (labour supply) semakin sedikit.

2.2. Ketimpangan Pendapatan

Menurut Lincolin Arsyad (2016) penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari proses pembangunan. Meskipun titik perhatian kita pada masalah ketimpangan seringkali tercurah pada masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan harta kekayaan (*assets*), hal tersebut hanyalah bagian kecil dari masalah ketimpangan yang ada di NSB (Negara Sedang Berkembang). Misalnya, ketimpangan kekuasaan, *prestige*, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi kebebasan untuk memilih, dan lain-lain.

Sebuah cara yang paling sederhana untuk menganalisis masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan dengan menggunakan analisis kurva kemungkinan produksi (*production possibility curve = PPC*) atau batas kemungkinan produksi (*production possibility frontier = PPF*). Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi dua jenis barang, masing-masing adalah: (1) barang-barang kebutuhan pokok (*necessity goods*), seperti makanan pokok, pakaian, perumahan dan sebagainya; dan (2) barang-barang mewah, seperti mobil mewah, video, televisi, pakaian mewah, dan sebagainya



sumber : Arsyad (2015)

Gambar 2.1
Pilihan Produksi antara Barang Mewah versus Barang Kebutuhan Pokok

Gambar 2.1 mendeskripsikan masalah tersebut. Pada sumbu vertikal menggambarkan semua barang mewah secara keseluruhan, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan kelompok barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, *Production Possibility Curve* (PPC) tersebut mendeskripsikan kombinasi maksimum dari kedua macam barang yang dapat dihasilkan perekonomian tersebut dengan cara menggunakan teknologi tertentu. Di gambar 2.1 GNP riil ditunjukkan oleh titik A dan B, banyak barang mewah dan sedikit barang kebutuhan pokok yang dihasilkan, sedangkan pada titik B terjadi sebaliknya. Bagi negara-negara yang berpendapatan rendah, kombinasi *output* dalam perekonomian pasar dan "campuran" adalah tingkat permintaan efektif konsumen secara keseluruhan, Hal ini disebabkan oleh posisi dan bentuk kurva permintaan masyarakat secara keseluruhan, terutama yang ditentukan oleh tingkat distribusi pendapatan nasional.

Di negara yang tingkat GNP dan pendapatan per kapitanya rendah, semakin timpang distribusi pendapatan, maka permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang kaya. Oleh karena itu, posisi produksi-konsumsi terletak pada titik A di mana orang kaya, biasanya, proporsi pengeluarannya lebih banyak untuk barang mewah daripada barang kebutuhan pokok. Pada akhirnya, keadaan ini akan menyebabkan kelompok miskin semakin menderita.

Adelman & Morris (1973) dalam buku Lincolin Arsyad (2016) mengemukakan delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita
2. Inflasi di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga angka pengangguran pun bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.

6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelestarian permintaan terhadap barang-barang ekspor NSB.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Masalah pemerataan merupakan suatu hal yang kompleks, karena seringkali berkaitan dengan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Sebagian masyarakat memandang pemerataan sebagai suatu tujuan yang bernilai karena adanya implikasi moral dan hubungan yang erat dengan unsur kelayakan dan keadilan sosial. Selain itu, masalah pemerataan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam setiap upaya pencapaian pemerataan oleh pemerintah, terdapat berbagai rintangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. Pendanaan yang diperlukan sangatlah besar. Adanya kendala anggaran disebagian besar NSB kiranya akan membatasi ruang gerak bagi upaya-upaya pengurangan tingkat kesenjangan.

2. Upaya tersebut seringkali tidak tepat sasaran karena tidak mampu menjangkau golongan miskin di negeri tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya interaksi antara perdesaan dan sektor-sektor informasi (yang merupakan representasi golongan miskin) dengan institusi-institusi formal, misalnya institusi keuangan dan pemerintah terkait.
3. Adanya hambatan politik, di mana golongan masyarakat berpendapatan rendah seringkali memiliki kekuatan politik yang lebih kecil daripada golongan masyarakat berpendapatan tinggi. Hal ini tentu akan menghalangi setiap upaya pengalokasian pengeluaran yang ditujukan untuk golongan miskin.

2.3. Pengaruh Tenaga kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan di Indonesia menunjukkan adanya transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke industri dan jasa. Hal ini dapat dibuktikan oleh indikator ekonomi yang memperlihatkan semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam PDB. Kontribusi sektor ini dalam PDB tahun 1980 sebesar 51 persen, dan menurun menjadi 15 persen di tahun 2010 (BPS, 2011). Sedangkan dalam periode yang sama, sektor industri dan jasa meningkat kontribusinya masing – masing untuk sektor industri dari 42 persen menjadi 47 persen serta untuk sektor jasa dari 34 persen menjadi 38 persen pada tahun 2010.

Kontribusi sektor pertanian yang semakin kecil tidak diikuti dengan menurunnya pangsa tenaga kerja di sektor ini. Cepatnya penurunan pangsa pertanian

terhadap PDB dibandingkan dengan penurunannya terhadap pangsa tenaga kerja, dapat menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terperangkap di bidang pertanian sehingga semakin tidak produktif dan tidak efisien, yang menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita tenaga kerja sektor pertanian (Nainggolan, 2007).

Ketidakseimbangan transformasi struktural perekonomian ini dengan demikian menghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pada gilirannya menjadi kendala pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengingat pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh kontribusi output seluruh sektor dalam perekonomian.

2.4. Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Hardianti Nur, Muhammad Yunus Zain dan Suharwan Hamzah (2018) adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor pertanian, penyerapan sektor tenaga kerja sektor pertanian, investasi sektor pertanian dan ekspor sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2001-2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat *time series* diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 84 persen dari variasi independen dalam penelitian ini menjelaskan variabel ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan 16 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model estimasi. Secara parsial pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh

positif dan signifikan, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan, investasi sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan, ekspor sektor pertanian tidak berpengaruh dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun secara bersama-sama menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, investas sektor pertanian dan ekspor sektor pertanian berpengaruh dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rara Min Arsyillah (2019) adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pendidikan dan ketenagakerjaan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode 2013-2017. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud). Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh pendidikan dan ketenagakerjaan 90,90% (nilai R²). Secara simultan variabel Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Kemudian Angka Melek Huruf dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2016) adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka terhadap

ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel dengan metode deskriptif. Data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan *Random Effect Model*. Hasil yang diperoleh adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2011-2014. Sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, serta tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2011-2014.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eliza Alfya Rahma (2018) adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita, PDRB Perkapita, IPM, TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. Sedangkan variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Wulan Pradnyaswari, Ida Bagus Darsana, dan Nyoman Djinar Setiawina (2019) adalah untuk mengetahui

dan menganalisis pengaruh upah dan modal manusia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) upah secara langsung tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, 2) modal manusia secara langsung berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, 3) upah secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan, 4) modal manusia secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan, 5) tingkat partisipasi angkatan kerja secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap distribusi pendapatan, 6) tingkat partisipasi angkatan kerja bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh variabel upah dan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan variabel *intervening* modal manusia terhadap distribusi pendapatan.